

# PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

Digital Generation For Digital Nation

**Tuti Supatminingsih, Andi Sawe Riesso,  
Andi Asti Handayani, Fatmawati,  
Muhammad Hasan**

**Pemberdayaan UMKM Sebagai Salah  
Satu Upaya Penanggulangan  
Kemiskinan dan Pengangguran di  
Kota Makassar**

Article Submitted : 27-05-2021

Article Accepted : 02-07-2021

Article Published : 08-08-2021

## Pemberdayaan UMKM Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Makassar

**Tuti Supatminingsih<sup>1\*</sup>, Andi Sawe Riesso<sup>2</sup>, Andi Asti Handayani<sup>3</sup>, Fatmawati<sup>4</sup>, Muhammad Hasan<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan, Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar, Indonesia

Email: [tuti.supatminingsih@unm.ac.id](mailto:tuti.supatminingsih@unm.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan, Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar, Indonesia

Email: [risawe7@gmail.com](mailto:risawe7@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan, Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar, Indonesia

Email: [astihan@gmail.com](mailto:astihan@gmail.com)

<sup>4</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujungpandang, Indonesia,

Email: [fatmawati\\_ak@poliupg.ac.id](mailto:fatmawati_ak@poliupg.ac.id)

<sup>5</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan, Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar, Indonesia,

Email: [m.hasan@unm.ac.id](mailto:m.hasan@unm.ac.id)



©2021 – Proceeding Teknologi Pendidikan Seminar Daring Nasional 2021 Digital

Generation For Digital Nation ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### **ABSTRACT**

*Currently, MSMEs are facing various obstacles and problems in their development, especially in the perspective of business management and entrepreneurship. This study is a type of qualitative research with a descriptive or qualitative narrative approach. In this study, the stages of empowering MSMEs will be described as one of the efforts to reduce poverty and unemployment in the city of Makassar. The results of this study identified the stages of empowering MSMEs as an effort to reduce poverty and unemployment which were divided into 4 stages, namely (1) the first stage, namely holding UMKM counseling, the aspect was formality; (2) the second stage, namely the capital aspect, namely from government sources; (3) the third stage, namely improving the quality of education, the aspect of which is local government; (4) the last stage is to open as many jobs as possible, the aspect is the nature of job opportunities.*

**Keywords:** *Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM); Poverty Reduction and Unemployment*

### **ABSTRAK**

*Saat ini UMKM menghadapi berbagai kendala dan permasalahan dalam pengembangannya, khususnya dalam perspektif pengelolaan usaha dan kewirausahaan. Kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau naratif kualitatif. Pada penelitian ini akan dideskripsikan tahapan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kota Makassar. Hasil kajian ini mengidentifikasi tahapan pemberdayaan UMKM sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu (1) tahapan yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan UMKM, aspeknya*

*yaitu formalitas; (2) tahapan yang kedua yaitu permodalan aspeknya yaitu dari sumber-sumber dari pemerintah; (3) tahapan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan, aspeknya yaitu pemerintah daerah; (4) tahapan yang terakhir yaitu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, aspeknya yaitu sifat dari kesempatan kerja.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*

---

## PENDAHULUAN

Di Kota Makassar, UMKM memiliki peran yang relatif sentral di sektor perekonomian. Namun, mereka masih belum bisa berkembang secara maksimal. Banyak UMKM yang mengalami kendala dan strategi yang dilakukan selama ini belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Tantangan dunia usaha khususnya perkembangan UMKM meliputi aspek yang lebih luas lagi, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mengenai kapabilitas manajemen organisasi, teknologi serta kompetensi wirausaha, akses permodalan yang lebih luas lagi, fakta pasar yang lebih transparan, faktor produksi input lainnya, dan iklim usaha yang sehat dan mendukung berkembangnya inovasi, kewirausahaan, dan praktik usaha dan persaingan yang sehat (Musa and Hasan, 2018).

Kemiskinan harus atau wajib untuk ditanggulangi, lantaran bila tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional (Nurhanisah, 2019). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yang ada di negara berkembang adalah salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Lantaran usaha yang ada tersebut adalah tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk lebih mengurangi masalah kesenjangan antar golongan seperti pada pendapatan dan antar pelaku bisnis, atau pun penyerapan kemiskinan dan tenaga kerja yang lebih banyak lagi di Indonesia. (Krisnawati and Hussein, 2016).

Dari hasil pendataan maka bisa disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi UMKM adalah sebagai berikut: (a) Keterbatasan Modal Usaha; (b) Melonjaknya harga bahan baku dan bahan penolong karena rencana kenaikan tarif dasar listrik; (c) pengetahuan desain teknis yang terbatas seperti estetika, teknologi produksi, tren pasar dan lain-lain; (d) manajemen pemasaran yang benar belum diterapkan; (e) Kualitas SDM

yang masih sangat minim sehingga pimpinan perusahaan belum bisa menerapkan manajemen produksi dengan tepat. Sedangkan permasalahan mendasar yang umumnya dihadapi UMKM dalam memperoleh modal usaha adalah karena prosedur pengajuan yang sulit, kurangnya agunan, ketidaktahuan tentang prosedur dan suku bunga yang tinggi.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, yang menjadi permasalahan internal hanyalah ketidaktahuan tentang prosedur, Sedangkan faktor lainnya adalah faktor eksternal (pihak kreditur). Untuk melindungi risiko kredit menuntut kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip manajemen modern, izin usaha resmi dan agunan. Perbedaan cara pandang antara permasalahan yang dihadapi UMKM dengan kondisi yang harus ditaati oleh lembaga penyalur kredit menjadi alasan mendasar mengapa UMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal usaha (Internasional et al., 2019).

Adapun beberapa hambatan dan permasalahan diantaranya adalah berdasarkan aspek permodalan, kemampuan manajemen bisnis, dan juga kualitas sumberdaya manusia dan pengelolanya. Kendala dan permasalahan pada bisnis kecil dan juga bisnis informal lainnya juga ditimbulkan lantaran sulitnya akses terhadap informasi dan sumber daya produktif misalnya seperti modal dan teknologi, yang akan mengakibatkan terbatasnya kemampuan bisnis kecil dan bisnis informal untuk lebih maju dan berkembang. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peranan yang krusial dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di negara maju dan berkembang. Terlepas dari peran penting yang dimainkan oleh UMKM dalam perluasan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan,

mereka masih menghadapi banyak tantangan. Antara lain, akses keuangan disebut-sebut menjadi yang teratas oleh banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Mengingat orientasi komersial dari sistem keuangan konvensional, mungkin tidak mengherankan jika bank tidak memberikan pinjaman kepada UMKM (Marwa, 2014).

Menurut Saleh (2015) upaya strategis yang bisa dilakukan dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM antara lain: Pertama, membangun iklim yang aman bagi pengembangan UMKM mencakup regulasi & proteksi bisnis. Yang Kedua membentuk sistem penjaminan bagi para pelaku bisnis mikro. Dan yang Ketiga menyediakan donasi teknis berupa pendampingan & donasi manajerial. Serta yang keempat yaitu memperbesar akses pengkreditan dalam lembaga keuangan. Pengembangan UMKM bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk lebih mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka (Nursini, 2020).

Pemberdayaan UMKM mendorong laju pertumbuhan ekonomi sehingga dianggap mampu mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran. Kehadiran UMKM dapat mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran dikarenakan dapat melibatkan banyak orang dengan berbagai jenis usaha.

UMKM merupakan salah satu cara yang dipakai untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga masyarakat memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup ataupun meningkatkan taraf hidup melalui UMKM (Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, 2020).

Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) (Hussain et al., 2017) telah memainkan peran penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara serta pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan memberikan pendapatan untuk masyarakat. Sektor Usaha Mikro Kecil & Menengah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai kiprah yang cukup krusial untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. UMKM memberi lebih kurang 87% kontribusi kepada beberapa badan usaha yang ada di Indonesia dan mempunyai andil sebanyak 85% dalam penyerapan tenaga kerja. Namun,

adanya sektor UMKM, banyaknya pengangguran yang akibatnya angkatan kerja yang tidak terserap pada dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UMKM sudah terbukti sebagai pilar perekonomian yang handal dan tangguh (Murdani, Sus Widayani (2019). Strategi penanggulangan atau pengurangan kemiskinan merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah wilayah terhadap pemberdayaan UMKM) untuk lebih menaikkan perannya pada perekonomian sebagai akibatnya dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan jumlah angka masyarakat miskin. Secara generik kebijakan pada pemberdayaan UMKM diarahkan atau dituntun untuk mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan yang ada dan menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun upaya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di masyarakat, kebijakan yang ditempuh merupakan suatu pemberian dukungan dan kemudahan untuk dapat lebih meningkatkan bisnis ekonomi yang lebih produktif berskala mikro dan juga informal, terutama pada kalangan keluarga kurang mampu pada wilayah yang tertinggal.

## **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif menurut Sugiyono memiliki kasus yang ingin dipecahkan dan masih bersifat sementara, tentatif, dan juga akan berkembang sesudah peneliti berada di lapangan. Peneliti mengungkapkan alasan mengapa memakai penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan yang akan dikaji belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan juga penuh makna. Sehingga peneliti memakai metode penelitian tadi lantaran kasus yang ingin penulis teliti adalah suatu persetujuan yang belum jelas dan juga sifatnya masih secara umum seperti gambaran luarnya saja.

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif atau naratif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui kenyataan mengenai apa yang dialami oleh subjek yang akan diteliti contohnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara keseluruhan dan menggunakan cara deskripsi pada bentuk istilah-istilah atau bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan juga lebih memanfaatkan

berbagai metode ilmiah. Pada penelitian ini yang akan dideskripsikan merupakan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Di Kota Makassar UMKM sangat banyak didapati dimana-mana, banyaknya UMKM ini setidaknya dapat mengurangi tenaga kerja sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di kota Makassar. Akan tetapi dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kendala atau hambatan pelaku UMKM ini adalah tidak adanya modal atau bantuan dari pemerintah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah di kota Makassar sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran mengalami 4 tahapan, yaitu mengadakan penyuluhan UMKM, permodalan, meningkatkan mutu pendidikan dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sementara itu, mengadakan penyuluhan UMKM dan

yang ada di kota Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** padahal kata mereka mengatakan bahwa telah didata untuk diberikan bantuan berupa modal akan tetapi belum bantuan itu belum mereka terima atau belum disalurkan sampai hari ini. Selain itu, kesimpulan sesuai hasil riset dan wawancara peneliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini

permodalan belum mendapatkan penyuluhan dan permodalan baik secara formal maupun nonformal dari Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pembahasan hasil wawancara tentang Pemberdayaan UMKM sebagai salah satu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, akan dijelaskan pada skema tahapan transformasi. Pemberdayaan UMKM sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di bawah ini.

**Gambar 3.1** Pemberdayaan UMKM sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran



Penjelasan skema tahapan UMKM sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai berikut:

### Tahapan Penyuluhan UMKM

Tahapan yang pertama yaitu Mengadakh penyuluhan UMKM. Pada tahapan ini pelaku UMKM perlu menerima penyuluhan tentang UMKM, meningkatkan pengetahuan mengenai UMKM, pengembangan potensi lokal UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan training dan pelatihan sertifikat

untuk masyarakat yang mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur. Sejalan penelitian terdahulu menurut (Nursini, 2020) mengatakan bahwa penciptaan lebih banyak usaha mikro, kecil, dan mnengah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk lebih mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.

Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu (J Widodo, S Wahyuni, M Zulianto, dan NN Islami, 2019) bahwa penyuluhan

UMKM haruslah diadakan karena Penyuluhan dapat menciptakan wirausaha baru.

### **Tahapan Permodalan**

Tahapan yang kedua yaitu Permodalan. Dengan adanya permodalan dapat memberikan keuntungan dari peningkatan peredaran modal usaha di sektor UMKM karena dapat membantu para pelaku UMKM untuk membuka usaha agar merekrut tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Tetapi masih banyak masyarakat masih mengalami kesulitan permodalan, seharusnya pemerintah bisa menyalurkan bantuan modal bagi para pelaku UMKM.

Sejalan dengan penelitian terdahulu (J Widodo, S Wahyuni, M Zulianto, dan NN Islami, 2019) secara internal hambatan bisnis UMKM merupakan permodalan, teknologi, akses pasar, manajemen terbatas, dan sumber daya manusia (SDM) serta informasi yang terbatas tentang UMKM. Sedangkan faktor eksternalnya merupakan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti praktek monopoli dan perlindungan beberapa industri yang besar.

### **Tahapan Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Tahapan yang ketiga yaitu Meningkatkan mutu Pendidikan. Dengan adanya peningkatan mutu pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang lebih baik. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci mengurangi pengangguran serta menjadikan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memberikan efektivitas produksi yang dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan wilayah. Strata pendidikan yang lebih akan memberikan tenaga kerja yang lebih berkualitas.

Sistem pendidikan mengajarkan masyarakat untuk menjadi mandiri dan mengajarkan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa semakin rendah tingkat pendidikan semakin tinggi kinerja perusahaan. Alasan tersebut mungkin tidak terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat yang kurang berpendidikan melihat kewirausahaan sebagai harapan terakhir mata pencaharian mereka sedangkan

mereka yang berpendidikan memiliki alternatif. Oleh karena itu, orang yang kurang berpendidikan memasukkan seluruh keberadaan mereka ke dalam bisnis. Selain itu, sebagian besar orang terpelajar ingin memulai usaha yang relatif besar. Pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin tidak dapat diukur dari hasil ekonomi semata, tetapi juga harus menghasilkan perbaikan kondisi sosial bagi masyarakat miskin. Pemberian aset pendidikan membuat orang miskin lebih siap dalam ekonomi modern.

### **Tahapan Membuka Lapangan Kerja**

Tahapan yang terakhir yaitu Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan adanya UMKM dapat mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja. Mempermudah membuka usaha, lalu akan berdampak terhadap lapangan kerja yang semakin banyak, sebagai akibatnya meningkatkan angka serapan pengangguran. Secara generik kebijakan pada pemberdayaan UMKM sebagai upaya mendukung penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan dan membangun kesempatan kerja yang lebih luas lagi.

Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa informasi sistematis tentang penciptaan lapangan kerja dan pemusnahan pekerjaan bagi lulusan pendidikan tinggi dibandingkan dengan kelompok pekerja lain, kami menemukan bahwa tingkat pengangguran dapat memberikan gambaran yang menyedihkan tentang dinamika permintaan tenaga kerja dan prospek pekerjaan bagi lulusan universitas. Perluasan lapangan kerja bagi lulusan universitas terjadi di berbagai industri, kecuali logam dasar, di mana lapangan kerja menurun. Layanan tersebut telah menunjukkan perluasan terbesar pekerjaan lulusan. Namun perlu dicatat bahwa, sementara di perbankan dan asuransi perluasan lapangan kerja terjadi dengan realokasi pekerjaan yang rendah di seluruh perusahaan, di layanan

## **Model Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar**

### **1) Faktor Eksternal**

#### **a. Peran Pemerintah**

Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM sangat strategis karena terkait dengan regulasi dan keberpihakan kepada dunia usaha baik dalam skala mikro, kecil maupun menengah. Hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah yang seluruhnya ditujukan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat. Regulasi menuntut partisipasi dan keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang menyentuh langsung dunia usaha. Kasus 1: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah anda pernah mengalami kesulitan modal dalam mengembangkan usaha? "...Ya pernah, seharusnya pemerintah bisa menyalurkan bantuan untuk modal para pelaku UMKM yang ada di kota Makassar..." (hasil wawancara dengan pemilik UMKM, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021). Kasus 2: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah anda pernah mengalami kesulitan modal dalam mengembangkan usaha? "...Ya pernah, seharusnya pemerintah bisa memberikan bantuan berupa modal kepada para pelaku UMKM..." (hasil wawancara dengan pemilik UMKM, Bayamin, tanggal 26 April 2021).

Berdasarkan (Prof. Zulkarnain. et al, 2018) kelemahan yang dihadapi oleh program UMKM hal-hal berikut yang harus dilakukan oleh pemerintah:

- a) Modal: terus mengucurkan Kredit Usaha Rakyat secara berkesinambungan dengan suku bunga rendah dan terjangkau serta memperluas skema kredit di berbagai usaha. Selain itu, diperlukan program pembinaan untuk menyalurkan dan menggunakan dana yang efisien dan efektif. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Program pembinaan dan pelatihan di berbagai tingkat keuangan, pemasaran, produksi dan sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi UMKM dalam menghadapi

persaingan.

- b) Perkembangan Teknologi Informasi: Dengan memfasilitasi institusi yang berwenang untuk meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran.
- c) Kelembagaan: mengefektifkan kelembagaan di pusat dan daerah agar bersinergi membantu UMKM yang mengalami kesulitan pemasaran. Termasuk peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan UMKM karena kelembagaan yang ada belum ada dan tidak efektif seperti Perusahaan Daerah yang belum menyentuh kegiatan UMKM.

#### **b. Peran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta**

Peran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta dapat dikaitkan dengan Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat dengan (CSR) yang merupakan kewajiban suatu perusahaan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan.

Pinjaman lunak kepada UMKM berupa bantuan permodalan dengan suku bunga rendah. Program ini secara operasional sangat membantu karena dapat diakses karena bebannya lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga bank. Seharusnya Badan Usaha Milik Negara atau pun Badan Usaha Milik Swasta yang beroperasi di suatu daerah sumber harus didistribusikan di daerah setempat. Ketentuan Kemitraan yang ada juga harus diikuti dengan penyaluran yang adil dan komprehensif agar tidak ada lagi dana yang tidak tersalurkan karena banyaknya UMKM yang kesulitan mendapatkan tambahan modal.

Panduan: dalam bentuk penggunaan dana termasuk pengembangan jaringan pasar dalam dan luar negeri. Selain itu juga dapat mengakses UMKM di berbagai event promosi seperti Bazaar, Pameran Produk, Export, dan lainnya. Dengan demikian peran ini lebih efektif untuk mengangkat UKM dalam persaingan dan pengembangan jaringan pasar.

### **c. Peran Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi memiliki Tri Dharma yang terdiri dari; pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dharma ketiga ini harus dilakukan bersama masyarakat termasuk UMKM yang membutuhkan sentuhan riset dan teknologi. Keterbatasan dana digunakan untuk menyumbangkan pikiran melakukan kegiatan, misalnya setahun sekali. Kasus 1: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah dengan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar dapat mengurangi kemiskinan? "...Ya sudah pasti..." (hasil wawancara dengan pemilik UMKM, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021). Kasus 2: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah dengan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar dapat mengurangi kemiskinan? "...Ya itu sudah pasti..." (hasil wawancara dengan pemilik UMKM, Bayamin, tanggal 26 April 2021).

UMKM membutuhkan pembinaan yang teratur dan berkesinambungan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut (Prof. Zulkarnain. et al, 2018).

## **2) Faktor Internal**

### **a. Aspek Keuangan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pemberian pinjaman atau pinjaman lunak dari Badan Usaha Milik Negara perlu diintensifkan karena kecilnya kontribusi yang diberikan kepada UMKM.

Sebagian besar UMKM masih menggunakan modal sendiri dalam usahanya. Stimulus pinjaman yang diberikan juga dapat meningkatkan kinerja pelaku usaha dari mikro ke kecil dan kecil ke menengah. Hal tersebut didukung oleh modal awal yang kecil untuk membangun usaha tersebut. Maka dari itu dengan pembinaan UMKM dalam hal komputerisasi akuntansi sangat mendesak untuk dilakukan percepatan sistem akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan sistem perbankan. Volume penjualan UMKM yang relatif kecil dapat didorong melalui jaringan pemasaran yang lebih luas lagi baik di dalam maupun luar negeri. Terbukanya jaringan pasar dapat meningkatkan profit UMKM. secara nasional dalam pertumbuhan

ekonomi. Kasus 1: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai mengenai dengan adanya UMKM ini apakah meningkatkan pendapatan mereka. "...Ya pasti bertambah..." (hasil wawancara dengan pemilik UMKM, Bayamin, tanggal 26 April 2021). Kasus 2: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah anda pernah mengalami kesulitan modal dalam mengembangkan usaha? "...Ya pernah, seharusnya pemerintah bisa menyalurkan bantuan untuk modal para pelaku UMKM..." (hasil wawancara dengan pemilik, UMKM, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021). Dari data yang disajikan pada bagian sebelumnya terlihat jelas bahwa program yang diharapkan oleh UMKM adalah penambahan modal kerja untuk pengembangan kapasitas perusahaan kedepannya, disamping keterampilan teknis dan kewirausahaan (Prof. Zulkarnain. et al, 2018).

### **b. Aspek Pemasaran**

Aspek pemasaran merupakan fungsi penting dalam kegiatan bisnis semakin banyak UMKM yang selalu dihadapkan pada permasalahan pasar yang relatif terbatas. (Prof. Zulkarnain. et al, 2018). Cakupan pasar yang terbatas baik pasar nasional maupun luar negeri memerlukan dorongan dari pemerintah dan instansi terkait terutama penggunaan media online karena UMKM relatif kecil menggunakan media ini, padahal cara pemasaran ini sudah mulai berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Demikian pula kerjasama dengan pihak ketiga masih relatif terbatas karena kerjasama tersebut diperlukan untuk memperlancar jalur distribusi produk. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam konteks pemasaran merupakan bagaimana kesadaran UMKM untuk segera membuat dan mendaftarkan merek sebagai bagian penting untuk keberlangsungan usaha. Kasus 1: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah dengan adanya bimbingan pendampingan dapat memudahkan pelaku UMKM? "...Ya sudah pasti memudahkan..." (hasil wawancara dengan pemilik UMKM, Bayamin, tanggal 26 April 2021). Kasus 2: Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah dengan adanya bimbingan pendampingan dapat memudahkan pelaku UMKM? "...Ya sudah pasti memudahkan..." (hasil wawancara dengan

pemilik UMKM, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021).

### **c. Aspek Sumber Daya Manusia**

Rendahnya keterampilan tenaga kerja di UMKM menyebabkan rendahnya kualitas produk. Oleh karena itu perlu adanya program dan kegiatan tentang teknologi produksi dan kewirausahaan. (Prof. Zulkarnain. et al, 2018). Pemerintah perlu mendorong peningkatan keterampilan di berbagai bidang teknis, manajerial dan kewirausahaan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, magang dan peningkatan wawasan melalui benchmarking.

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal strategi pemasaran dapat direkomendasikan beberapa hal. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil produksi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, hal ini terkait dengan penggunaan teknologi produksi yang memadai dan terstandar. Kedua, pemerintah daerah harus mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan pasar berbasis teknologi informasi dengan jangkauan yang sedemikian luas dan dibutuhkan pasar hari ini. Ketiga, efektivitas penggunaan dana csr dengan melakukan program kemitraan baik berupa bantuan permodalan maupun pembinaan umkm dari aspek manajerial dan kewirausahaan. Keempat, badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta bisa melakukannya pemerintah pusat, badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta hendaknya mendorong dan mendorong para pelaku umkm untuk menggunakan media online dalam strategi promosinya sesuai dengan tuntutan pasar yang semakin dinamis. Keenam, untuk mengembangkan umkm secara komprehensif perlu adanya bantuan permodalan, peningkatan keterampilan produksi, keterampilan kewirausahaan dan keterampilan manajerial.

Untuk menjamin kelangsungan usaha, diperlukan lembaga perantara pemasaran yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Dapat dibentuk di daerah tetapi terkoneksi dengan lembaga yang dibentuk secara nasional untuk menjamin output yang dihasilkan oleh umkm berupa badan usaha milik daerah. Selanjutnya perguruan tinggi harus mampu berperan dalam rangka pengembangan dan inovasi produk.

Kemitraan lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dan teknologi yang sesuai dengan permintaan pasar. Terakhir, menambah nilai tambah pada jasa yang ditawarkan dengan menghindari barang mentah, melainkan barang jadi yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha. Keberadaan umkm pada posisi pertumbuhan dan strategi horizontal diharapkan dapat memperluas pasar dengan membuka jaringan pasar baru, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar termasuk penggunaan teknologi terkini. Perguruan tinggi harus mampu berperan dalam rangka pengembangan dan inovasi produk. Kemitraan lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dan teknologi yang sesuai dengan permintaan pasar. Terakhir, menambah nilai tambah pada jasa yang ditawarkan dengan menghindari barang melainkan barang jadi yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha.

## **KESIMPULAN**

Hasil kajian ini mendeskripsikan tahapan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu (1) tahapan yang pertama yaitu Mengadakan penyuluhan UMKM, aspeknya yaitu formalitas; (2) tahapan yang kedua yaitu permodalan aspeknya yaitu dari sumber-sumber dari pemerintah; (3) tahapan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan, aspeknya yaitu pemerintah daerah; (4) tahapan yang terakhir yaitu Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, aspeknya yaitu sifat dari kesempatan kerja.

Selain itu hasil kajian ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban mereka sama saja. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat menyalurkan bantuan agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan juga dapat merekrut karyawan jika usaha mereka sudah berkembang dengan baik, dari hasil wawancara yang kami dapat tidak ada kendala yang berarti selain permodalan tersebut. Kami juga menanyakan soal pemberdayaan apakah mereka pernah mendapatkan pemberdayaan, akan tetapi rata-rata jawaban dari mereka belum pernah mendapatkan pemberdayaan

ataupun pelatihan. Padahal yang telah kami telusuri bahwa pemerintah kota makassar telah melakukan pembinaan dan juga pemberdayaan akan masalah UMKM ini, ini berarti bahwa pembinaan dan pemberdayaan di kota Makassar masih belum merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agyapong, D. (2010) 'Kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tingkat Pendapatan Dan', *Jurnal Internasional Bisnis Dan Manajemen*, Vol.5. Doi: Issn 1833-3850 E-Issn 1833-8119.
- Akuntansi, Penerapan, Mikro, P. And Akuntansi, Perusahaan (2020) 'Penerapan Mikro, Kecil, Dan Menengah'.
- Cardoso, A. R. And Ferreira, P. (2011) 'Can Be Misleading R Fo Pe Er Re Vi'.
- Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, K. E. W. (2020) 'Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo', *Sell Journal*, 5(1), P. 55.
- Elimam, H. (2017) 'The Role Of Small Businesses (Small Scale Economic Projects) In Alleviating The Acuity Of Unemployment', *International Business Research*, 10(3), P. 120. Doi: 10.5539/ibr.V10n3p120.
- Fapohunda, T. (2014) 'Reducing Unemployment Through The Informal Sector In Nigeria Reducing Unemployment Through The Informal Sector In Nigeria', (November 2013).
- Hejazziey, D. (2009) 'Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengurangan Pengangguran', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). Doi: 10.15408/Aiq.V1i1.2452.
- Hussain, M. D. et al. (2017) 'Memberantas Kemiskinan Melalui Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah : An Empiris Eksplorasi', *Jurnal Mayfeb Bisnis Dan Manajemen*, 1, Pp. 42–49.
- Liu, L. (2016) 'Study Of Contemporary College Students' Entrepreneurship Training', (Icassr 2015), Pp. 493–495. Doi: 10.2991/Icassr-15.2016.136.
- Supriyanto (2006) 'Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Volume 3 N, Pp. 1–16.
- Internasional, J. Et Al. (2019) 'Pembangunan Usaha Kecil Dan Menengah (Umkh)', *Jurnal Internasional Riset Ekonomi , Bisnis Dan Akuntansi*, 2019(3), Pp. 215–224.
- Krisnawati, K. And Hussein, R. (2016) 'Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', *Sosio Informa*, 2(2), Pp. 137–154. Doi: 10.33007/Inf.V2i2.235.
- Marwa, N. (2014) 'Micro, Small And Medium Enterprises' External Financing Challenges: The Role Of Formal Financial Institutions And Development Finance Intervention In Tanzania', *International Journal Of Trade, Economics And Finance*, 5(3), Pp. 230–234. Doi: 10.7763/Ijtf.2014.V5.376.
- Murdani , Sus Widayani, H. (2019) 'Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)', *Jurnal Abdimas*, 23(2), Pp. 152–157.
- Musa, C. I. And Hasan, M. (2018) 'The Influence Of Social, Economic, And Demographic Characteristic On Working Hours Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Makassar City', *Journal Of Physics: Conference Series*, 1028(1). Doi: 10.1088/1742-6596/1028/1/012181.
- Nurhanisah, Y. (2019) 'Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Menurun', *Indonesiabaik.Id*, 5, Pp.43–54.

- Nursini, N. (2020) 'Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) And Poverty Reduction: Empirical Evidence From Indonesia', *Development Studies Research*, 7(1), Pp. 153–166. Doi: 10.1080/21665095.2020.1823238.
- Pangapanga *et al.* 2013. "Modelling The Role Of Pro Poor Agro Based Micro, Small And Medium Enterprises On Poverty Reduction In Malawi." 1(5):024–030.
- Prof. Zulkarnain., *et al* (2018) 'Model Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Andmedium Di Indragirii. Indragir Provinsi', *Jurnal Internasional Teknik Dan Teknologi Sipil*, 9(13), Pp. 1641–1650.
- Saleh, M. (2015) 'Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembardayaan Sektor Umkm', V (2), Pp. 170–177.
- Widodo, J. *et al.* (2019) 'The Analysis Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes).